

**DEMOKRASI DIGITAL SEBUAH TREN BARU
GLOBALISASI SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA**
Studi Kasus Penguatan Pesan Melalui Petisi Daring Change.Org
Oleh Netizen Di Indonesia

Hartanto

Dosen Tetap Program Studi S-1 Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Respati Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto Km. 6,3, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
e-mail: tanto0072000@gmail.com

ABSTRACT

Globalization is an expansion, deepening, and acceleration which connect to all aspects of socio-contemporary life around the world. Globalization promotes the development of digital democracy in Indonesia in the form of public sphere channels through cyberspace characterized by the expansion of global communication and the widespread of institutions and democratic norms demands. Digital democracy brings impact to the emergence of public sphere which becomes the mediation between society and government where the public can manage and organize independently as the owners of public opinion in function to advocate and control the government policy through public spheres; one of them is through Change.Org.

Keywords: Globalization, Digital Democracy, Public Sphere, Petition

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang bersifat multidimensi saat ini gerakan sosial *netizen* atau dalam istilah yang lebih mudah dipahami *netizen* adalah para pengguna internet, semakin mengemuka. Mengemukanya gerakan sosial melalui internet berjalan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, internet saat ini semakin digandrungi sebagai sebuah teknologi yang mampu menghilangkan sekat-sekat ruang dan waktu, internet sudah menjadi kebutuhan yang pokok bagi hampir semua warga dunia dan khususnya masyarakat Indonesia. Suara publik mengenai isu-isu yang dianggap penting menjadi lebih terwadahi dengan adanya tren petisi daring (*online*). Petisi daring saat ini merupakan sebuah format baru di Indonesia yang memiliki fungsi sebagai ruang publik, dimana ruang publik

tersebut diperlukan oleh masyarakat untuk mewedahi dan menyuarakan pendapatnya, karena di era demokrasi saat ini masyarakat menginginkan adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat tentang sebuah permasalahan yang dianggap penting. Pertumbuhan pengguna internet dan layanan media sosial yang pesat diimbangi dengan sensitivitas dan kreativitas netizen memberikan sebuah gambaran bahwa internet saat ini menjadi pendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi, tentu saja media arus utama tetap berperan penting menjadikan gerakan *netizen* sebagai suara publik.

Tumbuhnya penyampaian pesan melalui petisi daring merupakan dampak dari globalisasi dalam konteks penyebaran nilai-nilai demokrasi, karena sebenarnya model penyampaian tersebut bermula dari budaya yang berasal dari luar Indonesia. Jika kita merunut ke waktu dimasa lampau model petisi daring berawal pada tahun 1990 tepatnya pada bulan April, ketika itu perusahaan LOTUS dari Amerika Serikat berencana meluncurkan produknya yang bernama *Market Place: Households*. Sebuah basis data yang dijual dalam bentuk CD-ROM untuk komputer Macintosh yang berisi data 120 Juta penduduk Amerika Serikat dari 80 jenis rumah tangga yang berbeda lengkap dengan nama, alamat nomor telepon dan pola konsumsi mereka, data tersebut dijual oleh LOTUS kepada pebisnis yang ingin memasarkan produknya. Rencana penjualan basis data berupa CD-ROM tersebut kemudian menuai banyak protes dikalangan masyarakat Amerika Serikat yang merasa telah kehilangan privasi mereka, protes pun dilancarkan melalui email dan forum diskusi di internet dan kemudian berhasil menekan LOTUS untuk membatalkan penjualan produk tersebut (Caughey dan Ayers, 2013: 26-30).

Pada konteks Indonesia, munculnya petisi daring ini mencerminkan gerakan di dunia maya yang semakin menguat dan memiliki dampak nyata. Pemanfaatan media sosial untuk mengadvokasi isu-isu sosial sebenarnya bukan dimulai sekitar tahun 2009 silam ketika itu kita masih ingat dengan munculnya gerakan sejuta *Facebooker* mendukung KPK ketika pemimpinnya ditangkap polisi. Contoh lain adalah ketika masyarakat memperlihatkan dukungan secara daring untuk Prita Mulyasari dan ketika masyarakat melalui *change.org* membuat petisi untuk mengawal kasus “papa minta saham” Setya Novanto dalam persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Peran petisi daring lewat media sosial ini sebenarnya mirip gerakan kontrol sosial yang tradisional namun menjadi berbeda ketika teknologi internet dijadikan senjata baru, yang bisa secara cepat membuat petisi yang dibuat dapat diterima oleh target. Model penyampaian partisipasi publik dengan memanfaatkan media teknologi inilah yang disebut oleh Barry N. Hague (1999) sebagai demokrasi digital.

Dari uraian diatas kita dapat mencermati bahwa globalisasi dalam konteks penyebaran nilai-nilai demokrasi khususnya dalam konteks

demokrasi digital membawa perubahan sosial dan budaya kepada masyarakat Indonesia melalui adopsi budaya yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan dalam ranah lokal Indonesia, tentunya ini sangat menarik dibahas mengingat geliat para *netizen* di Indonesia semakin meningkat dengan adanya kopi darat para aktivis petisi daring yang diselenggarakan oleh *change.org* seperti diliput oleh Harian Kompas pada 28 Desember 2015 lalu. Oleh karena itu tulisan ini bermaksud untuk membahas mengenai perkembangan demokrasi digital di Indonesia khususnya penyampaian petisi daring melalui situs *change.org*, mengapa muncul fenomena tersebut serta dampak yang ditimbulkannya.

RUMUSAN MASALAH

Menyimak gambaran mengenai fenomena demokrasi digital yang diuraikan pada bagian pendahuluan, maka rumusan dalam makalah ini adalah:

(1). Bagaimana perkembangan demokrasi digital di Indonesia secara umum dan secara khusus penguatan pesan melalui petisi daring pada situs *change.org*? (2). Mengapa fenomena tersebut muncul di Indonesia?. (3). Apa dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut dalam konteks Indonesia?

KERANGKA TEORI

Teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis adalah globalisasi, demokrasi digital dan ruang publik.

Globalisasi

Globalisasi terdiri dari proses-proses yang menghubungkan orang dimana saja, sehingga memunculkan saling ketergantungan diseluruh dunia dan ditandai dengan pergerakan orang, benda, dan ide-ide secara cepat dan dalam skala besar melintasi batas-batas kedaulatan. David Held dan rekan-rekan dalam (Phil Williams et al, 2006: 548) mendefinisikan globalisasi sebagai perluasan, pendalaman dan percepatan saling keterkaitan semua aspek kehidupan sosial kontemporer seluruh dunia, dari budaya sampai kriminal, keuangan sampai dengan spiritual. Dalam sebuah dunia global, hubungan yang terjadi antar orang dan hubungan antar ide-ide muncul dan tumbuh sebagai akibat dari kemajuan komunikasi, perjalanan, maupun perdagangan yang menimbulkan kesadaran bersama diantara individu-individu. Pada kondisi ini, banyak para ahli dan pengamat percaya Negara semakin kehilangan kontrol atas nasib mereka dan diserang oleh kekuatan diluar perbatasan dan semuanya diluar kendali Negara. Menurut Mansbach dan Rafferty (2012: 888) globalisasi memiliki ciri-ciri antara lain: (1) penyebaran komunikasi global, (2) meningkatnya kompetensi manusia dan

partisipasinya dalam politik global, (3) munculnya pasar global, (4) penyebaran budaya sekuler dan konsumeris di seluruh dunia, (5) munculnya bahasa Inggris sebagai bahasa globalisasi, (6) meluasnya permintaan akan lembaga-lembaga dan norma-norma demokrasi, dan (7) jaringan antar kelompok yang menjadi cikal-bakal masyarakat sipil global.

Dalam konteks penulisan makalah ini, penulis akan menekankan pada ciri globalisasi yang pertama dan keenam, yakni penyebaran komunikasi global dan meluasnya permintaan akan lembaga-lembaga dan norma-norma demokrasi yang terkait dengan tema penulisan. Ciri globalisasi yang pertama adalah adanya penyebaran komunikasi global. Penyebaran teknologi komunikasi berakibat pada mengecilnya peran jarak geografis. Globalisasi dibangun di atas proliferasi atau pengembangan computer canggih dan teknologi mikroelektronik yang membantu individu dan kelompok untuk berkomunikasi hampir seketika melalui teknologi internet yang menyediakan media komunikasi seperti e-mail, video call, telepon seluler dan satelit. Dengan demikian arus informasi menjadi tidak lagi terbatas dan berjalan dalam waktu yang cepat serta media untuk berinteraksi antar manusia pun menjadi lebih beragam, bersifat *real time* dan dapat diakses dimanapun serta kapanpun. Globalisasi juga melibatkan penyebaran teknologi satelit untuk televisi dan radio, serta pemasaran global film dan acara-acara televisi. Secara keseluruhan, revolusi teknologi komunikasi mengatasi jarak fisik dalam berbagai dimensi kehidupan manusia seperti dimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Mc Grew (1992: 77) globalisasi juga ditandai dengan produksi global atas produk lokal dan lokalisasi produk global. Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan.

Ciri globalisasi yang terkait dengan tema penelitian ini selanjutnya adalah penyebaran demokrasi. Globalisasi disertai dengan penyebaran norma-norma demokratis dari daerah-daerah inti di Amerika Utara, Eropa Barat dan Jepang sampai Amerika Latin, Asia, Negara-negara bekas blok Uni Soviet dan bahkan ke Afrika. Meskipun terlalu dini untuk mendeklarasikan kemenangan global demokrasi liberal, seperti yang ditulis oleh Francis Fukuyama (2006) ketika menulis buku *The End of History and The Last Man*. Globalisasi saat ini sedang menyaksikan meningkatnya hak untuk memilih pemimpin sendiri, meskipun memang kita sangat ketahui bahwa demokrasi masih rapuh disebagian kawasan dan ditentang dengan keras oleh pihak-pihak yang kekuasaannya akan hilang jika menghadapi pemilihan umum yang bebas, dan juga penerimaan atas hak-hak individu untuk menyuarakan suaranya melalui ruang-ruang publik yang semakin banyak tersedia baik itu yang daring (*online*) maupun luring (*offline*).

Dari uraian mengenai globalisasi dan ciri-cirinya diatas penulis dapat menarik sebuah pemahaman bahwa globalisasi merupakan sebuah keadaan atau kondisi dimana ada sebuah perluasan, pendalaman dan percepatan saling keterkaitan semua aspek kehidupan sosial kontemporer seluruh dunia, dari budaya sampai kriminal, keuangan sampai dengan spiritual dan salah satunya adalah penyebaran nilai-nilai demokrasi ke seluruh dunia.

Demokrasi Digital

Dalam uraian mengenai globalisasi serta ciri-cirinya pada bagian terdahulu dari makalah ini, globalisasi memiliki ciri adanya perkembangan komunikasi global yang kemudian menjadikan adanya masyarakat informasi (*information society*). Sejak era tahun 1970-an dunia telah mengalami dan merasakan adanya sebuah revolusi digital dimana terdapat sebuah perubahan teknologi yang sifatnya elektronik serta mekanik menuju teknologi yang lebih tinggi yakni teknologi digital. Revolusi dalam bidang teknologi tersebut yang ditandai dengan adanya produksi massal dan penyebaran penggunaan computer, telepon selular, internet serta perangkat lainnya kemudian membawa dampak pada perubahan pola hubungan dan interaksi sosial diantara warga masyarakat, pebisnis juga pemerintah. Masyarakat informasi merupakan sebuah hasil dari revolusi digital yang masih berlanjut hingga saat ini. Masyarakat informasi sering diidentifikasi sebagai masyarakat pasca-industri (Bell, 1976), masyarakat postmodern (Giddens, 1990), masyarakat jaringan (Castells, 1997) dan yang terakhir menurut Hague&Loader (1999), Alexander&Pal (1998) serta Hacker&Dijk (2000) adalah *digital democracy* (demokrasi digital).

Era informasi membawa perubahan yang sangat signifikan pada pola komunikasi antar manusia dan perubahan yang luas pada *landscape* politik. Dalam dunia yang sudah terkoneksi atau dalam istilah asingnya *wired world* pengumpulan secara luas individu-individu yang memiliki kepentingan bersama atau perhatian yang sama terhadap suatu isu sosial dapat dengan cepat terbentuk dan membuat sebuah suara atau opini publik secara kolektif. Model seperti ini tentunya mustahil terjadi pada beberapa dekade yang lalu dimana perkembangan teknologi yang ada belum mendukung dan memadai. Kondisi ini pun berpengaruh pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh partai politik maupun para politisi dalam bentuk yang belum terpikirkan sebelumnya dan tentunya akan memiliki dampak yang besar pada demokrasi dan lembaga perwakilan (Alexander dan Pal, 1998).

Komunikasi di lihat sebagai proses sosial yang mendasar, sebuah kebutuhan dasar manusia, dan menjadi sebuah fundamental bagi seluruh organisasi sosial dalam sebuah masyarakat informasi. Setiap orang dimanapun dan kapanpun harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memanfaatkan keuntungan dari masyarakat informasi

(*Declaration of Principles Building The Information Society*, 2003). Masyarakat informasi tidak saja membawa dampak pada nilai-nilai humanistik yang baru tetapi juga pembentukan level baru demokrasi. Demokrasi digital menjadi sebuah *leading system* dalam konteks politik, ekonomi dan sosial budaya. Demokrasi digital menjadi sebuah *framework* dimana masyarakat informasi berjalan. Demokrasi digital menampilkan level yang lebih tinggi dari demokrasi liberal. Demokrasi digital memunculkan sebuah simbiosis teknologi elektronik dan perkembangan teknologi komunikasi serta informasi dengan manusia dan Negara. Demokrasi digital berinteraksi manusia, kelompok manusia, pemerintah, kalangan bisnis masyarakat lokal dan *social networks*. Demokrasi digital merupakan interaksi dialektis antara masyarakat dengan teknologi (Castells, 1997: 5).

Demokrasi digital menurut Hacker dan Dijk (2000: 1) merupakan sebuah kumpulan usaha untuk melaksanakan demokrasi tanpa dibatasi oleh ruang, waktu dan kondisi fisik yang lain menggunakan ICT (*Information and Communication Technology*) serta CMC (*Computer-mediated Communication*), tetapi meskipun demikian tidak berarti menggantikan praktik-praktik politik tradisional (*analogue political practices*). Demokrasi digital mengkombinasikan demokrasi partisipasionis dengan demokrasi perwakilan yang secara kualitatif mentransferkan kekuatan rakyat ke dalam ICT (Castells, 1997: 5). Demokrasi digital secara aktual mengeksplorasi perkembangan pesat interaksi antara dunia maya dengan kebijakan sosial (Alexander dan Pals, 1998).

Secara teoretis dan praktis demokrasi digital menjelaskan bagaimana ICT mempengaruhi demokrasi dan proses politik yang sedang berjalan. ICT saat ini memainkan peranan yang signifikan dalam pencapaian demokrasi yang kuat berdasarkan jaringan komunitas. Sejumlah ahli yakin bahwa ICT merupakan faktor yang potensial untuk mendorong perkembangan demokrasi, dan memfasilitasi sebuah lompatan kuantum dalam konteks demokrasi politik (Becker, 1998: 343). Demokrasi digital menjembatani kesempatan untuk membuat sebuah jaringan global yang tidak kenal batas wilayah, menyediakan sebuah level atau model baru dalam kebebasan berpendapat dengan tidak dibatasi oleh sensor yang dilakukan pemerintah atau Negara, menciptakan sebuah level baru asosiasi yang bebas, menciptakan dan mendiseminasi informasi yang tidak terikat pada subjek hukum tertentu, dan membongkar identitas nasional berdasarkan pada adopsi identitas lokal dan global (Hague dan Loader, 1999: 6).

Dari uraian mengenai demokrasi digital di atas penulis memperoleh pemahaman bahwa demokrasi digital merupakan sebuah bentuk demokrasi yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat ruang, waktu dan geografis dimana manusia menjadi lebih bebas dalam mengeluarkan pendapat melalui saluran teknologi komunikasi dan informasi dengan memindahkan kekuatan suara

rakyat dari politik tradisional kepada dunia maya atau *cyberspace* yang sifatnya global tanpa mampu disensor oleh pemerintah atau negara.

Ruang Publik

Konsep ruang publik identik dengan Jurgen Habermas seorang tokoh teori kritis madzhab Frankfurt. Menurut Habermas ruang publik adalah ruang di mana warganegara bisa berunding mengenai hubungan bersama mereka sehingga merupakan sebuah arena institusi untuk berinteraksi pada hal-hal yang berbeda (Craigh Calhoun, 1993: 110-111). Ruang publik merupakan seluruh wilayah yang memungkinkan kehidupan sosial dapat membentuk opini publik yang relatif bebas. Dalam wilayah tersebut terjadi praktik sosial, politik dan budaya dalam bentuk pertukaran pendapat yang terbuka dan diskusi mengenai masalah-masalah terkait kepentingan sosial dan umum. Ruang publik memiliki tujuan untuk menjadikan manusia mampu melakukan refleksi diri secara kritis dalam konteks politik, ekonomi maupun budaya. Menurut Habermas yang dikutip Oliver Boyd-Barret (1995), tidak ada aspek kehidupan yang bebas dari kepentingan, bahkan juga ilmu pengetahuan. Struktur masyarakat yang emansipatif dan bebas dari dominasi dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adalah struktur ideal. Apa yang ingin disampaikan oleh Habermas adalah mengenai sistem demokrasi. Habermas yakin bahwa sebuah ruang publik yang kuat, terpisah dari kepentingan-kepentingan partikelir, dibutuhkan untuk menjamin tercapainya keadaan ini. Ruang publik yang dipahami Habermas bukanlah prinsip yang abstrak melainkan sebuah konsep yang praktis, tetapi *culturally-embedded social practice*. Ruang publik ini ditujukan sebagai mediasi antara masyarakat dan Negara dengan memegang tanggung jawab negara pada masyarakat melalui publisitas. Tanggung jawab Negara mensyaratkan bahwa informasi-informasi mengenai fungsi Negara dibuat agar bisa diakses sehingga aktifitas-aktifitas negara menjadi subyek untuk dikritisi dan mendorong opini publik. Pada tahap ini, ruang publik dirancang untuk sebuah mekanisme institusi untuk merasionalisasikan dominasi politik dengan memberikan tanggungjawab negara pada warganegara.

Sedangkan publisitas diartikan sebagai penyampaian hal-hal yang termasuk dalam "kepentingan umum" pada negara melalui bentuk-bentuk yang secara sah menjamin kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan berserikat. Pada tahap ini, ruang publik dirancang untuk jenis interaksi diskursif yang spesifik. Di sini ruang publik dikonotasikan sebagai tempat untuk diskusi mengenai hal-hal rasional yang tak terbatas mengenai hal-hal yang bersifat umum. Hasil dari diskusi merupakan opini publik yang menjadi konsensus mengenai kebaikan bersama (Craigh Calhoun, 1993: 112-113). Habermas mengangkat obrolan di *coffee house* (Inggris) abad 18, salon

(Prancis) dan *Tischgesellschaften* (Jerman) sebagai ruang publik. Disitulah forum yang ideal tempat berbagai gagasan didiskusikan secara terbuka. Komentar-komentar yang ada dalam berbagai pemberitaan diperdebatkan. Pada akhirnya, opini yang tercipta mampu mengubah berbagai bentuk hubungan dan struktur sosial kemasyarakatan baik di kalangan kaum aristokrasi maupun lingkungan bisnis pada umumnya (Jurgen Habermas :1993).

Secara singkat ruang publik diartikan sebagai sebuah ruang yang menjadi mediasi antara masyarakat dan Negara dimana publik mengatur dan mengorganisasikannya sendiri sebagai pemilik opini publik (Craig Calhoun, 1993: 290). Adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang kemudian memunculkan demokrasi digital, dalam konteks makalah ini penulis melihat keterkaitan antara perkembangan demokrasi digital dengan ruang publik, dengan adanya perkembangan teknologi informasi memungkinkan adanya perluasan ruang publik sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang menjadi bagian dari demokrasi digital. Ruang publik pun kemudian tidak dibatasi oleh sekat-sekat ruang, waktu dan geografis. Dalam konteks penulisan makalah ini ruang publik yang dimaksudkan adalah situs petisi daring *change.org*.

KERANGKA PEMIKIRAN

Demokrasi digital di Indonesia merupakan sebuah fenomena baru yang merupakan sebuah bentuk demokrasi yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat ruang, waktu dan geografis dimana manusia menjadi lebih bebas dalam mengeluarkan pendapat melalui saluran teknologi komunikasi dan informasi melalui dunia maya atau *cyberspace* yang sifatnya global tanpa mampu disensor oleh pemerintah atau negara. Munculnya fenomena tersebut disebabkan oleh globalisasi yang memiliki ciri penyebaran komunikasi global dan meluasnya permintaan akan lembaga-lembaga dan norma-norma demokrasi. Demokrasi digital kemudian memunculkan ruang publik yang menjadi mediasi antara masyarakat dan Negara dimana publik mengatur dan mengorganisasikannya sendiri sebagai pemilik opini publik yang berfungsi untuk mengadvokasi kebijakan pemerintah.

HIPOTESIS

Hipotesis atau argument utama dalam makalah ini sebagai berikut: (a) perkembangan demokrasi digital di Indonesia muncul dalam bentuk saluran-saluran ruang publik melalui dunia maya (*cyberspace*), (b) demokrasi digital di Indonesia muncul disebabkan oleh globalisasi yang bercirikan penyebaran komunikasi global dan meluasnya permintaan akan lembaga-lembaga dan norma-norma demokrasi, (c) demokrasi digital berdampak pada munculnya

ruang publik yang menjadi mediasi antara masyarakat dan Negara dimana publik mengatur dan mengorganisasikannya sendiri sebagai pemilik opini publik yang berfungsi untuk mengadvokasi kebijakan pemerintah sehingga kebijakan pemerintah lebih terkontrol melalui ruang-ruang publik tersebut khususnya dalam konteks penulisan makalah ini adalah *change.org*.

Seperi yang telah diuraikan pada bagian terdahulu makalah ini, demokrasi digital merupakan sebuah bentuk demokrasi yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat ruang, waktu dan geografis dimana manusia menjadi lebih bebas dalam mengeluarkan pendapat melalui saluran teknologi komunikasi dan informasi dengan memindahkan kekuatan suara rakyat dari politik tradisional kepada dunia maya atau *cyberspace* yang sifatnya global tanpa mampu disensor oleh pemerintah atau negara. Era teknologi informasi memaksa kita untuk meninjau kembali praktik demokrasi yang telah berjalan saat ini dalam konteks aktor, insitusi dan pelaksanaannya dipandang berada dalam kondisi yang rapuh dan di pandang oleh masyarakat berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Perubahan yang cepat dalam konteks politik, ekonomi dan sosial budaya yang ditandai oleh munculnya era informasi memberikan sebuah peluang untuk memikirkan dan jika mungkin memperbaiki kondisi demokrasi dalam konteks aktor, insitusi dan pelaksanaannya.

Model demokrasi perwakilan telah dilaksanakan hampir disetiap Negara di abad ke-20. Demokrasi perwakilan berisi pencarian kekuasaan, memberikan argument terhadap pencarian kekuasaan tersebut yang dilakukan oleh sejumlah kecil politisi yang mewakili kepentingan bersama. Pada kenyataannya para politisi tersebut seringkali tidak mencerminkan kepentingan masyarakat dan cenderung terjebak pada elitisme (Mitchels, 1962). Kecenderungan saat ini para politisi cenderung ternoda dengan tindakan koruptif, serta mementingkan kepentingan dirinya sendiri atau partisan, hal itu kemudian memunculkan antipati dari masyarakat khususnya para kaum muda yang terdidik (Wilkinson dan Mulgan, 1995).

Hal tersebut kemudian memicu masyarakat untuk lebih kritis dengan didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan menyebarnya nilai-nilai demokrasi sebagai akibat globalisasi sehingga memunculkan demokrasi digital yang berawal di Amerika Serikat kemudian menyebar hingga ke Indonesia melalui ruang-ruang publik untuk berpartisipasi dalam mengadvokasi kebijakan. Dalam konteks Indonesia perluasan ruang publik-politik melalui aktivisme media sosial di Indonesia mulai menimbulkan perhatian luas (Inside Indonesia 2012). Menurut lembaga riset pasar e-Marketer pengguna internet di Indonesia mencapai 2 juta orang pada Tahun 2000 dan menjadi 83,7 juta orang pada 2014 serta menempati urutan keenam di dunia, diprediksikan pada tahun 2017 mencapai 112 juta orang dan akan

mengalahkan Jepang, yang menjadikan Indonesia sebagai negara kelas menengah terbesar di Asia Tenggara.

Dari data diatas kita dapat melihat bahwa pengguna internet di Indonesia terbentuk dan bertambah secara signifikan. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai pengguna jejaring sosial *facebook* terbesar keempat dan pengguna *twitter* terbesar kelima. Jakarta sebagai ibu kota Negara bahkan dijuluki sebagai ibukota *twitter*, karena menjadi kota yang memiliki pengguna *twitter* terbanyak dibandingkan kota-kota lain di dunia. Hal tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi dalam komunitas *on-line* sangat penting di kalangan kelas menengah, dan mulai menggeser pengaruh media konvensional. Keterlibatan kelas menengah – khususnya dari kalangan generasi muda – dalam media sosial baru itu menduduki porsi yang sangat besar, baik untuk mendapatkan hiburan, interaksi sosial, maupun untuk ruang ekspresi-diri. Yang juga signifikan adalah banyak pula aktivis sosial memanfaatkan media sosial digital ini untuk terlibat dalam diskursus publik menyangkut isu-isu yang selama ini mereka kerjakan secara *off-line*. Nugroho dan Syarief (2012)¹ memperlihatkan aktivisme media sosial menyentuh proses-proses politik demokratisasi.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan demokrasi digital adalah situs *change.org*. *Change.org* adalah platform petisi terbesar di dunia, memberdayakan orang di mana pun untuk menciptakan perubahan yang ingin mereka lihat. Terdapat lebih dari 70 juta pengguna *Change.org* di 196 negara, dan setiap hari orang menggunakan alat kami untuk mentransformasi komunitas mereka - secara lokal, nasional dan global. Apakah itu perjuangan seorang ibu melawan *bullying* di sekolah putrinya, pelanggan yang mendesak bank untuk membatalkan biaya yang tidak adil, atau warga/rakyat yang menuntut pejabat korup bertanggungjawab, ribuan kampanye yang dimulai oleh orang-orang seperti Anda telah menang di *Change.org* - dan akan lebih banyak lagi kemenangan setiap minggunya. Layanan ini mulai beroperasi di Amerika Serikat, pada 7 Februari 2007. Di Indonesia, *change.org* resmi membuka kantor perwakilan pada tahun 2012. Dalam laporan kilas balik 2015, *Change.org* Indonesia *chapter* telah memiliki sekitar 1,9 juta pengguna. Angka itu meningkat dari tahun 2014, yang baru mencapai 900 ribu pengguna. Pertumbuhan pengguna itu, diklaim berimplikasi pada sejumlah kemenangan. Sepanjang 2015, telah tercatat sejumlah petisi yang menuai kemenangan, antara lain: #RipYongki, "Penurunan Tarif Data Di Wilayah Timur", dan #PapaMintaSaham.²

¹ <http://virtue.or.id/ebooks/MerancangArahBaruDemokrasi/OEBPS/Text/Section0046.xhtml> diakses pada tanggal 8 Januari 2016 Pukul 18:26 WIB

² <http://www.change.org/id/tentang> diakses pada tanggal 8 Januari 2016 pukul 11.15 WIB

Kita hidup di zaman yang menakjubkan, ketika kesempatan untuk membuat perbedaan lebih besar dari yang pernah ada sebelumnya. Mengumpulkan orang di balik kepedulian pada waktu dahulu sulit, memerlukan banyak waktu, uang, dan infrastruktur kompleks. Namun teknologi telah membuat kita lebih terhubung dari sebelumnya. Sekarang ini memungkinkan bagi siapa saja untuk memulai sebuah kampanye dan segera menggalang ratusan orang lainnya secara lokal atau ratusan ribu di seluruh dunia, membuat pemerintah dan perusahaan lebih responsif dan akuntabel. Kami ingin mempercepat pergeseran dramatis ini - dengan membuatnya lebih mudah untuk membuat perbedaan, dan dengan menginspirasi semua orang untuk menemukan apa yang mungkin ketika mereka berdiri dan bersuara.³ Berikut disampaikan infografis kegiatan *change.org* sepanjang tahun 2015:

Gambar 1. Infografis *change.org* Indonesia Tahun 2015



Sumber: www.change.org

Selama lima tahun terakhir, istilah netizen atau warga dunia maya makin populer di masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah. Kiprah netizen mewarnai banyak proses pertumbuhan bangsa ini. Kekuatan netizen juga terlihat dalam setiap proses demokrasi, termasuk dalam

³ Ibid

pemilihan gubernur DKI pada 2012 dan pemilihan presiden 2015. Meski hanya bermodal perangkat selular, komputer dan internet, kekuatan netizen melalui media sosial turut menentukan kemenangan dan kekalahan seseorang yang bertarung di pesta demokrasi. Perkembangan komunikasi dan teknologi informasi juga menantang netizen untuk mencari cara terbaik dan efektif mengawasi proses-proses demokrasi dan pembangunan. Para netizen membuat aplikasi yang memudahkan orang mengawasi pemilu, pilkada, hingga pengawasan penggunaan dana desa. Kian hari kian banyak orang berpartisipasi dalam pembangunan, meski itu dari pojok kamar dengan bekal telepon pintar dan sambungan internet. Tanpa kita sadari, kita sudah menjadi bagian dalam catatan sejarah demokrasi digital di negeri ini. Netizen menjadi saksi sekaligus pelaku perubahan di banyak hal. Mulai dari politik, hukum, lingkungan, dan banyak isu publik lain. Tahun 2015 yang telah berakhir telah membuktikan, kekuatan netizen luar biasa dahsyat. Ini patut menjadi perhatian bagi para elit politik, penguasa, pemangku jabatan publik agar tidak main-main dalam membuat kebijakan. Jika tidak mau berhadapan dengan kekuatan netizen yang tidak bisa dibendung lagi.⁴

Globalisasi menyebabkan kapasitas daya jangkauan informasi yang disediakan internet memungkinkan warganegara menjadi lebih memiliki pengetahuan tentang isu-isu pemerintahan dan politik; sementara interaktivitas media memungkinkan timbulnya bentuk-bentuk baru komunikasi dengan pemerintah, pejabat terpilih dan pelayan publik. Inilah yang kemudian disebut demokrasi digital dan demokrasi ini akan berkembang menjadi demokrasi partisipatoris melalui pendayagunaan dan penyebaran teknologi komunikasi digital. Demokrasi digital berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melibatkan warganegara, mendukung proses pembuatan keputusan demokratik, penguatan demokrasi representatif dan perluasan politik partisipatoris. Aktor-aktor dan sektor-sektor demokratik dalam konteks ini meliputi pemerintah, pejabat-pejabat terpilih, organisasi politik, serta pemilih (warganegara). Demokrasi digital memiliki dampak pada provisi informasi, deliberasi, dan partisipasi dalam pembuatan keputusan yang lebih mampu mengakomodasi keterlibatan masyarakat dengan ruang-ruang publik yang lebih beragam. *Civic engagement* mengambil bentuk jejaring sosial, organisasi, dan forum-forum online dan kian meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat.⁵

Secara keseluruhan dari uraian dalam tulisan ini kita dapat melihat bahwa hipotesis yang diajukan pada awal tulisan ini terbukti. Globalisasi

⁴ http://portalkbr.com/editorial/12-2015/bangkitnya_demokrasi_digital/77795.html diakses pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 11:02 WIB

⁵ <http://virtue.or.id/ebooks/MerancangArahBaruDemokrasi/OEBPS/Text/Section0046.xhtml> diakses pada tanggal 5 Januari 2016 Pukul 1:25 WIB

mendorong perkembangan demokrasi digital di Indonesia dalam bentuk saluran-saluran ruang publik melalui dunia maya (*cyberspace*) yang bercirikan penyebaran komunikasi global dan meluasnya permintaan akan lembaga-lembaga dan norma-norma demokrasi. Demokrasi digital berdampak pada munculnya ruang publik yang menjadi mediasi antara masyarakat dan Negara dimana publik mengatur dan mengorganisasikannya sendiri sebagai pemilik opini publik yang berfungsi untuk mengadvokasi kebijakan pemerintah sehingga kebijakan pemerintah lebih terkontrol melalui ruang-ruang publik tersebut khususnya dalam konteks penulisan makalah ini adalah *change.org*.

SIMPULAN

Globalisasi menyebabkan konsep dan nilai-nilai demokrasi menjadi tersebar ke seluruh penjuru dunia. Demokrasi yang didalamnya mengandung nilai persamaan diantara warga negara, kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap hukum dan keadilan menjadi titik tolak bagi keberhasilan demokrasi modern. Penyebaran teknologi informasi dan komunikasi yang lagi-lagi disebabkan oleh globalisasi kemudian menjadi pemicu berkembangnya nilai-nilai demokrasi kedalam sebuah wujud baru demokrasi yaitu demokrasi digital dengan memanfaatkan ruang-ruang publik baru melalui *new media*. Kemudahan akses informasi dan kemampuan menjembatani jarak menjadikan gagasan seperti pertimbangan dan partisipasi dalam pembuatan keputusan menjadi mudah direalisasikan. Demokrasi digital menyediakan akses informasi dengan beragam rupa, menyediakan ruang publik yang menjadi prasyarat bagi sebuah tatanan demokrasi, dan interaksi memadai antara warga negara dengan pemerintah, maupun antarsesama warga negara.

Ruang publik merupakan wilayah kehidupan sosial yang memungkinkan terjadinya diskusi dan mengidentifikasi masalah-masalah sosial. Konten petisi *change.org* mengkonstruksi sebuah peristiwa dalam bentuk ruang publik yang sangat mudah diakses. Di mana konten petisi memungkinkan terjadinya diskusi dari hasil tanggapan atau respon dari petisi yang dibuat. Tanggapan atau respon tersebut tentunya dilontarkan dalam atmosfer yang bebas. Pengertian bebas tersebut terdapat ide atau gagasan tentang kesetaraan/kesederajatan dari para pihak yang berkomunikasi. Konten petisi tidak lagi bersifat *private* atau personal tetapi bersifat publik karena siapapun dapat memberi tanggapan atau respon perihal apa yang ada di konten petisi tersebut. Konten petisi membentuk suatu proses dukungan terhadap sebuah permasalahan. Proses memberikan dukungan inilah yang menjadi diskursus virtual tentang suatu topik atau isu yang terkait dengan kehidupan publik dan kebaikan bersama, semoga dengan perkembangan pesat demokrasi digital di Indonesia bisa menjadikan Negara ini mampu

mewujudkan cita-citanya untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, C.J., & Pal, L.A. (eds.). 1998. *Digital Democracy: Policy and Politics in the Wired World*. Oxford: Oxford University Press
- Becker, T. 1998. Governance and electronic innovation: A clash of paradigms. *Information, Communication and Society Vol. 1, No.3*, hal. 339–343.
- Bell, D. 1976. *The Coming of Post-Industrial Society*. New York: Basic Book
- Boyd-Barret, Oliver. 1995. *Conceptualizing the Publik Sphere, in Oliver Boyd Barret and Chris Newbold, Approach to Media A Reader*. New York: Arnold
- Castells, M. 1997. *The Rise of the Network Society, volume 2: The Power of Identity*. Oxford: Blackwell
- Craigh, Calhoun. 1993. *Habermas and the Public Sphere, Rethinking the Publik Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy*. Cambridge: MIT Press
- Fukuyama, F. 2006. *The end of history and the last man*. New York: Simon and Schuster
- Giddens, A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press
- Goldstein, D., Shafritz, J., & Williams, P. 2006. *Classic Readings and Contemporary Debates in International Relations*. Belmont California: Thomson/Wadsworth
- Habermas, Jurgen. 1993. *The Structural Transformation of The Publik Sphere An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Translated by Thomas Burger*. Cambridge Massachusetts: MIT Press
- Hacker, K. L. & Dijk, I. (eds.) 2000. *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice*. London: Sage

Hague, B. N., & Loader, B. 1999. *Digital democracy: Discourse and decision making in the information age*. London: Routledge

McCaughey, M., & Ayers, M. D. (Eds.). 2013. *Cyberactivism: Online activism in theory and practice*. London: Routledge

McGrew, A. 1992. 'A Global Society?' dalam Hall, S., Held, D., and McGrew, T. (Eds.). *Modernity and its future*. Cambridge: Polity Press

Michels, R. 1962. *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. New York: Collier

Rafferty, L. Kirsten., & Mansbach, W. 2012. *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusa Media

Wilkinson, H. and Mulgan, G. 1995. *Freedom's Children: Work Relationships and Politics for 18–34 Year Olds in Britain Today*. London: Demos

http://portalkbr.com/editorial/12-2015/bangkitnya_demokrasi_digital/77795.html diakses pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 11:02 WIB

<http://virtue.or.id/ebooks/MerancangArahBaruDemokrasi/OEBPS/Text/Section0046.xhtml> diakses pada tanggal 5 Januari 2016 Pukul 1:25 WIB

<http://www.change.org/id/tentang> diakses pada tanggal 8 Januari 2016 pukul 11.15 WIB

